

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian statistik dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Pemda yang memiliki pendapatan yang besar secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipublikasikan melalui *website* pemda, semakin besar pendapatan yang dimiliki maka semakin mampu pula pemerintah daerah tersebut dalam membuat *website* dan kabupaten yang paling banyak menggunakan *website* sebagai media transparansi adalah kabupaten yang mengalami peningkatan pendapatan.
- b. Ukuran pemerintah daerah (SIZE) berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam

website pemda. Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar lebih mampu untuk membuat/membeli *website* resmi pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki lebih sedikit aset dan kabupaten yang paling banyak menggunakan *website* sebagai media transparansi adalah kabupaten yang mengalami peningkatan total aset. Jumlah total aset yang besar memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana terkait transparansi seperti melakukan pengembangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Melalui *website*, pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya akan transparansi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan hemat biaya.

- c. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan derajat desentralisasi dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi yang besar serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak serta merta mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resminya. Pemerintah kabupaten di Pulau Jawa yang memperoleh opini WTP untuk LKPD Tahun 2021 mencapai 59%, yang berarti sebagian besar pemerintah kabupaten di Pulau Jawa telah menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan SAP dan SAK dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada kenyataannya WTP atau tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK, pemerintah kabupaten di Pulau Jawa tetap melakukan transparansi laporan keuangan melalui internet.

d. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Opini audit yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat masyarakat dengan baik pula, akan tetapi opini audit tidak mampu memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemda. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar memiliki total aset yang besar pula. Semakin besar aset yang dimiliki pemerintah daerah maka akan semakin sulit pengelolaannya seperti pencatatan atas aset – aset daerah. Hal ini dapat menjadi penyebab pemerintah daerah enggan mengungkapkan informasi keuangan pada website resminya. Pada kenyataannya WTP atau tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK, pemerintah kabupaten di Pulau Jawa tetap melakukan transparansi laporan keuangan melalui internet.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih memiliki keterbatasan, adalah sebagai berikut:

1. Data total aset yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah sulit ditemukan, karena pemerintah kabupaten yang ada di Pulau Jawa masih sedikit yang mengunggah neraca pada *website* resminya.

2. Pada penelitian ini variabel kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan variabel opini audit diukur menggunakan variabel *dummy*, sehingga pada saat dilakukan uji normalitas data sulit untuk berdistribusi normal.
3. Pada saat dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot (*scatter plot*) data pada penelitian ini ternyata mengalami gejala heteroskedastisitas.

5.3 Saran

Berdasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya dapat mencari referensi tambahan untuk mencari data total aset selain dari *website* resmi pemerintah daerah dan situs resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan.
2. Peneliti berikutnya dapat mengganti metode pengukuran variabel kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan variabel opini audit dari variabel *dummy* dapat diganti menggunakan skala poin dimana dari tingkatan pada poin diklasifikasikan berdasarkan pada kelengkapan laporan keuangan pada *website* serta pada kualitas dari hasil opini audit yang didapat.
3. Pada saat melakukan uji heteroskedastisitas peneliti berikutnya dapat menggunakan metode pengujian heteroskedastisitas yang lain seperti: uji *park*, uji *glesjer*, dan uji koefisien korelasi *spearman*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhajjriana, G. I., Nor, W. and Wijaya, R. (2017) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), pp. 100–109.
- Anthony Putra, A. A. and Syofyan, E. (2020) 'Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), pp. 2020–2034. doi: 10.24036/jea.v2i1.193.
- Azis, I. and Hapsari, D. W. (2020) 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018)', *e-Proceeding of Management*, 7(2), pp. 3262–3269.
- Cusolito, A. P. and Maloney, W. F. (2018) *Productivity revisited: Shifting paradigms in analysis and policy*. World Bank Publications.
- Damanpour, F. (1991) 'Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators', *Academy of management journal*, 34(3), pp. 555–590.
- Evans, J. H. and Patton, J. M. (1987) 'Signaling and monitoring in public-sector accounting', *Journal of Accounting Research*, pp. 130–158.
- Firly, A., Diana, N. and Mawardi, M. C. (2019) 'Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017)', 08(07), pp. 119–131.
- Ghozali, I. (2011) 'Spss Imam Ghozali 2011.Pdf'.
- Hapsari, D. W. *et al.* (2020) 'Implementation of Regional Financial Statements using Internet Financial Reporting', *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), pp. 12174–12179.
- Heriningsih, S. (2013) 'Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa)', *Buletin Ekonomi*, 11(1), pp. 1–86.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', in *Corporate Governance*. Gower, pp. 77–132.

- Laswad, F., Fisher, R. and Oyelere, P. (2005) 'Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities', *Journal of accounting and public policy*, 24(2), pp. 101–121.
- Lesmanawati, D. (2019) 'Pengaruh local government wealth , intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di indonesia secara online', *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(2), pp. 109–116.
- Mahmudi, M. (2016) 'Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Mahsun, M. (2006) 'Pengukuran kinerja sektor publik', *Yogyakarta: BPFE*.
- Mahsun, M., Purwanugraha, H. A. and SULISTIYOWATI, F. (2007) 'Akuntansi sektor publik'.
- Makmum, M. S. and Rahayu, S. (2018) 'Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (studi Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016)', *eProceedings of Management*, 5(3).
- Mardiasmo (2018) 'Akuntansi Sektor Publik', *Akuntansi Sektor Publik*, p. 7.
- Masra, E. A. and Sari, V. F. (2020) 'Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), pp. 2757–2771. doi: 10.24036/jea.v2i2.246.
- Medina, C. and Rufin, R. (2015) 'Transparency policy and students' satisfaction and trust', *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Moehardiono, I. A. and Yuliati, A. (2021) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 12(3), pp. 717–727.
- Mutiha, A. H. (2017) 'Faktor penentu aksesibilitas internet financial reporting pada e-government pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat', *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, pp. 550–560.
- Nor, W., Hudaya, M. and Novriyandana, R. (2019) 'Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant (s)', *Asian Journal of Accounting Research*.
- Nosihana, A. and Yaya, R. (2016) 'Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia',

- Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), pp. 89–104. doi: 10.24815/jdab.v3i2.5389.
- Patrick, H. *et al.* (2007) ‘The role of need fulfillment in relationship functioning and well-being: a self-determination theory perspective.’, *Journal of personality and social psychology*, 92(3), p. 434.
- Pontoh, G. T. *et al.* (2018) ‘Internet Financial Reporting Of Public Institutions and E-Government as a Medium of Good Governance in Indonesia’, *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 3(3), pp. 28–33. doi: 10.35609/jfbr.2018.3.3(1).
- Priyastiwati, P. and Saputra, N. (2019) ‘Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet’, *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), pp. 157–172. doi: 10.32477/jrm.v6i2.356.
- Styles, A. K. and Tennyson, M. (2007) ‘The accessibility of financial reporting of US municipalities on the Internet’, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Suryani, G. (2015) ‘Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 18(2), pp. 1–24.
- Trisnawati, M. D. and Achmad, K. (2014) ‘Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet’, *Simposium Nasional Akuntansi*, 17.
- Yustikasari, Y. (2018) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se-Indonesia)’, *None*, 11(1), pp. 34–52.
- Zimmerman, J. L. (1977) ‘The municipal accounting maze: An analysis of political incentives’, *Journal of accounting research*, pp. 107–144.